

## ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM RESI GUDANG KOMODITI RUMPUT LAUT (*Gracilaria sp*) DI KABUPATEN TAKALAR

Mardia Mardia<sup>1\*</sup>, Mardiana Ethrawaty Fachrie<sup>2</sup>, Dahniar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia Timur

<sup>2</sup>Program Studi Perikanan dan Kelautan Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Program Studi Agribisnis Universitas Sulawesi Barat

\*Email korespondensi: [mardiadian3190874@gmail.com](mailto:mardiadian3190874@gmail.com)

### Abstrak

Rumput laut salah satu komoditas ekspor nonmigas, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, menyediakan lapangan kerja di sektor budidaya dan industri serta pendapatan bagi sebagian besar masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kesenjangan sistem resi gudang komoditi rumput. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujungbaji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Yang dilaksanakan pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Juni 2020. Analisis kesenjangan yang digunakan dalam penelitian untuk melihat kesenjangan proses pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Takalar rumput laut. Analisis kesenjangan merupakan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial ataupun yang diharapkan. Dari hasil penelitian dan analisis kesenjangan sistem resi gudang kesimpulannya adalah analisis kesenjangan secara aktual di lapangan dapat dilihat bahwa pesertanya sistem resi gudang untuk rumput laut pesertanya adalah kelompok tani. Lembaga penilaian kesesuaian yakni BPSMB dalam pengambilan sampel bersifat homogen terhadap komoditi rumput laut. Dan keterbatasan pengelola gudang dan lembaga penilaian kesesuaian, sarana dan prasarana. Sosialisasi/edukasi, pendampingan bagi masyarakat petani/nelayan / koperasi dan pelaku usaha tentang manfaat sistem resi gudang.

**Kata Kunci :** Sistem Resi Gudang; Komoditi Rumput Laut; Kelembagaan

### 1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sangat besar karena memiliki luas perikanan laut dan pesisir sebesar 26 juta hektar. Selain berfungsi sebagai daerah penangkapan ikan, perairan pesisir juga dimanfaatkan untuk budidaya perikanan (budidaya laut). Di Indonesia, budidaya rumput laut semakin gencar digalakkan, baik secara intensif maupun menyeluruh, dan para petani di wilayah pesisir melakukan kegiatan tersebut sebagai sumber pendapatan utama mereka (Akrim, Dirawan, and Rauf 2019).

Unsur penetapan harga komoditas, di mana pada saat musim panen, pasokan komoditas bertambah dan harga komoditas turun, sehingga posisi tawar petani sangat rendah, merupakan salah satu isu utama dalam industri pertanian. Keadaan ini terkadang muncul dan akan menurunkan minat masyarakat, terutama di kalangan petani, sehingga membahayakan keamanan pasokan pangan nasional. Untuk mendorong efisiensi operasi produksi pertanian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui sistem resi gudang sebagai sarana pembiayaan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Jika harga komoditas rendah, petani dapat menunda penjualan dan menjualnya saat harga naik. Paradigma petani harus diubah dari "petani" menjadi "pengusaha" (Mardia 2022).

Masalah pertanian yang umum terjadi di Indonesia adalah turunnya harga pada saat musim panen raya. Petani tidak dapat mempertahankan hasil panen/ produksi mereka lebih jauh karena

kurangnya dana dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai. Kondisi ini biasanya dimanfaatkan oleh tengkulak dan rentenir untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Penerapan resi gudang untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebagai model pemasaran komoditas pertanian. Pemanfaatan rumput laut *Gracillaria sp* begitu luas ditandai dengan meningkatnya permintaan pasar. Namun, peningkatan kebutuhan produksi rumput laut tidak diimbangi dengan peningkatan produksi yang menjanjikan. Selama kurun waktu 2015 hingga 2018, terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan, yaitu dari 103,995 juta ton pada 2015 menjadi 74,131 juta ton pada 2018 (DKP Takalar, 2019). Penurunan produksi pada usaha budidaya rumput laut *Gracillaria sp* akan mempengaruhi besarnya pendapatan yang diterima oleh petani rumput laut.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, Sistem Resi Gudang atau disingkat SRG adalah alat yang memposisikan kembali komoditas pertanian sebagai barang bernilai ekonomis yang mudah digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Menurut undang-undang tersebut, tujuan SRG adalah untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, mengamankan arus bebas komoditas, mengurangi biaya distribusi, dan menumbuhkan lingkungan yang menguntungkan bagi bisnis. Resi Gudang sebagai surat bukti kepemilikan barang di gudang

SRG yang dapat dijamin ke Lembaga keuangan bank atau non-bank (Edi et al. 2019). Sistem resi gudang adalah proses yang digunakan dalam penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sedangkan resi gudang adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pengelola gudang sebagai konfirmasi kepemilikan barang yang disimpan di sana (Armansyah 2020).

Penerapan SRG menguntungkan karena dapat mengurangi risiko pasar produk pertanian, meningkatkan sistem ketahanan pangan dan akses pemilik rumah terhadap pembiayaan, serta meningkatkan kualitas dan transparansi usaha pergudangan melalui pengaturan dan pengawasan. SRG merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengendalikan inflasi dan harga komoditas dengan menunda perdagangan (Hidayah and Nasyyi 2019).

Beberapa tantangan yang dihadapi penerapan SRG di beberapa wilayah Indonesia, menurut Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (2011) sebagai berikut 1) karena sebagian besar lahan sempit, sulit untuk menggabungkan temuan, 2) kekurangan kemampuan manajerial petani dan supervisor dan 3) kurangnya pengetahuan tentang SRG di kalangan petani dan pengelola; biaya operasi yang tinggi (Sulistyaningsih, Rudi Wibowo, Yuli Hariyati 2019).

Barang yang boleh disimpan di gudang dalam Penerapan sistem resi gudang adalah barang yang: (a) mempunyai daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan; (b) memenuhi standar kualitas tertentu; dan (c) tidak dilarang oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 (c). minimal barang yang disimpan; Sementara itu, jika persyaratan perdagangan berjangka komoditas terpenuhi, suatu komoditas dapat diperdagangkan berjangka jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) harga selalu berfluktuasi; (b) tidak ada intervensi pemerintah; semata-mata berdasarkan penawaran dan permintaan; (c) tersedia dalam jumlah yang cukup; homogen; tidak dikuasai oleh satu kelompok tertentu; dan (d) komoditas potensial di daerah-daerah yang terkait dengan pertanian berkelanjutan (Anitasari 2015).

Sebagian besar petani kecil, khususnya di Indonesia, memiliki prinsip tunai (modal) meskipun panen belum berakhir atau pada saat panen. Petani kecil membutuhkan modal dan uang tunai, sehingga satu-satunya cara adalah membawa hasil panen mereka ke perantara atau pemilik perusahaan besar. Petani sangat bergantung pada tengkulak. Perantara dapat menentukan harga sesuai dengan patokan yang telah mereka tetapkan. Banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem resi gudang. Untuk itu, peneliti mengajak para pemangku kepentingan untuk

memanfaatkan sistem resi gudang dan berperan aktif bersama dalam koridor hukum terkait agar sistem resi gudang dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Pembangunan pertanian berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, terutama di pedesaan. Target utama pembangunan pertanian dewasa ini adalah peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani, meningkatkan taraf hidup petani dan memperluas kesempatan kerja masyarakat yang masih mengandalkan sektor pertanian (Suryaningsih 2021).

Ingatlah pepatah, "kesenjangan harus diisi." Asumsi bahwa gap selalu terisi didasarkan pada anggapan bahwa pelaku pasar akan melakukan upaya yang signifikan untuk menutup gap yang mereka lihat dalam fluktuasi harga. Tidak semua ketidaksetaraan diciptakan sama, jadi penting untuk mempertimbangkan ukuran kesenjangan selain hanya jumlah kesenjangan (Julier, Dahlquist, Baur 2012). Lain halnya oleh (Langford and Lecturer 2007) bahwa kesenjangan adalah hubungan antara apa yang dianggap penting dan perbedaan turunan antara kinerja dan harapan. Mengukur indikator ini biasanya melibatkan evaluasi banyak situasi misi dan skenario dan tindakan, atau lebih umum, memandu kebijakan dan tujuan.

Secara harfiah, "gap" mengacu pada perbedaan (berbeda) antara dua hal. Salah satu strategi yang digunakan untuk menilai tingkat pelayanan adalah analisis kesenjangan, yang sering diterapkan dalam disiplin manajemen. Analisis kesenjangan sangat membantu untuk menentukan ukuran kesenjangan kinerja antara kinerja aktual dan standar kerja yang diharapkan, mengidentifikasi peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan, dan berfungsi sebagai dasar untuk keputusan tentang prioritas dan biaya yang terkait dengan pemenuhan standar layanan yang ditetapkan (Muchsam, Falahah, and Saputro 2011). Diasumsikan semakin kecil kesenjangan, semakin tinggi kualitas pelayanan. Dunia bisnis modern diganggu oleh ketidakpastian. Ketidakpastian akan menimbulkan kesenjangan (Burkhard Schwenker · Torsten Wulf 2013).

Analisis kesenjangan ada di mana-mana, dibuktikan dengan tiga ketimpangan: distribusi pendapatan yang tidak merata di antara petani, kelompok tani yang terjadi, dan petani yang menggunakan sistem resi gudang dengan yang tidak. Petani kecil yang menyimpan hasil pertaniannya hanya menerima keuntungan (pendapatan) yang lebih kecil dibandingkan dengan pedagang besar atau pemilik usaha. Meskipun sistem resi gudang memiliki beberapa manfaat bagi petani, petani seringkali kesulitan

untuk memenuhi persyaratannya. Karena tuntutan kehidupan keluarga dan kebutuhan untuk panen berikutnya, petani hanya ingin menjual atau membeli segera.

Kondisi masyarakat nelayan yang ada di Desa Ujungbaji terdiri dari beberapa kelompok tani yaitu 8 kelompok yang berdiri sejak tahun 2014. Kospermindo sebagai pengelola gudang untuk rumput laut di Sulawesi Selatan memberikan fasilitas berupa bibit dan pembinaan bagi nelayan untuk memproduksi rumput laut. Rumput laut basah ini biasanya di jual langsung /putus ke pedagang atau dijual ke koperasi, hal ini disebabkan karena kondisi di lapangan masyarakat petani belum memahami sistem resi gudang, sistem ijon dan lebih membutuhkan uang cash untuk kebutuhan keluarga dan panen berikutnya. Mutu dan kualitas rumput laut yang sesuai dengan SNI 0104441-1998. Hal ini menentukan keberhasilan petani/nelayan untuk meningkatkan produksi dan kualitas dengan standar yang telah ditetapkan. Alur penerbitan resi gudang secara aktual komoditi rumput laut di Kabupaten Takalar di mulai dari kelompok tani mendatangi Koperasi Makkio Dalle dengan membawa komoditi rumput laut dalam bentuk kering yang akan diresigudangkan. Menguji mutu dan mendaftarkan ke asuransi Jasindo untuk menghindari resiko. Biaya uji mutu dan asuransi di bayar oleh kelompok tani melalui lembaga penilaian kesesuaian dalam hal ini adalah BPSMB (Balai Pengujian dan Sertifikasi mutu Barang) khususnya di Sulawesi Selatan. Tujuannya untuk menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang: nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang dan tanda tangan yang berwenang. Apabila syarat, maka pengelola gudang akan membuat perjanjian pengelolaan barang, yang berisi deskripsi barang dan asuransinya. Pengelola Gudang akan menerbitkan resi gudang (setelah menerima kode registrasi dari Pusat Registrasi) yang berisi informasi tentang: judul resi gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan. Pengelola gudang menyampaikan informasi tersebut pada Pusat Registrasi dan seluruh data dan informasi dalam resi gudang ini ditatausahakan oleh pusat registrasi. Jika semua proses ini telah dilakukan, resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang bisa diterima pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank BJB. Di Bank Jawa Barat (BJB) yang ada di Kota Makassar yang bergerak sebagai tempat pembiayaan khusus untuk gudang dengan sistem resi gudang dengan ketentuan 70 % untuk pembayaran awal dan 30% untuk pembayaran selanjutnya. Pada saat barang yang telah terbit resinya maka pelaku usaha dan pengelola gudang memasarkan komoditi gabah baik menjual

langsung ke pasar atau melalui pasar lelang komoditi (PLK). Selanjutnya apabila terjual maka akan membayar 70 % ke Bank BJB. Untuk 30% sebagai saving saja apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya pelaku usaha tidak mengikuti perjanjian yang telah disepakati. Yang sebenarnya 30% ini menurut UU No 9 Tahun 2011 menunggu komoditi harganya naik secara nasional. Seharusnya 30% ini yang harus dinikmati oleh petani (Poktan/Gapoktan), pelaku usaha karena di targetkan komoditi rumput laut akan naik. Ada selisih harga dari 70% dengan 30% pada saat harga naik secara nasional. Seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. Alur Proses Penerbitan Resi Gudang Komoditi Rumput Laut di Kospermindo.

Terdapat tantangan dalam penerapan sistem resi gudang komoditas rumput laut di Kabupaten Takalar, yang diperkuat dengan penelitian tentang tantangan serupa di kabupaten lain di Indonesia. Misalnya, petani menghadapi tantangan dalam mengakses informasi tentang sistem resi gudang rumput laut, memperoleh pembiayaan karena ikatan keuangan dengan tengkulak, dan memiliki rumput laut dengan kualitas yang tidak memenuhi standar Indonesia. Waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kualitas produk dan waktu pengiriman uang dari bank atau lembaga keuangan non-bank adalah dua tantangan yang dihadapi oleh manajer gudang. Keterbatasan penelitian pada produk rumput laut adalah masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar peserta rantai pasok. Adanya tantangan sistem resi gudang komoditi rumput laut *Gracilaria sp* maka peneliti melihat kesenjangan dalam proses pelaksanaan sistem resi dengan menggunakan analisis kesenjangan di Desa Ujung Baji kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

**2. Metode Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 1 tahun dimulai pada bulan September 2019 sampai bulan Juni 2020 di Desa Ujungbaji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Lokasi penelitian dipilih purposive sampling Kabupaten Takalar dengan pertimbangan daerah ini merupakan salah Kabupaten yang mempunyai gudang dengan sistem resi dan berhasil menerbitkan resi gudang mulai tahun 2017-2021 dengan komoditi rumput laut. Purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasi jumlah responden dimana jumlah sampel yang ada sebanyak 100 responden untuk yang menjadi obyek penelitian. Analisis kesenjangan yang digunakan dalam penelitian untuk melihat kesenjangan proses pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Takalar rumput laut. Analisis kesenjangan merupakan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial ataupun yang diharapkan. Tahapan analisis kesenjangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi prinsip dan komponen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program sistem resi gudang, seperti ketentuan dan aturan dalam sistem resi gudang.
2. Menganalisis situasi terkini terkait implementasi sistem resi gudang melalui wawancara dan observasi dari data yang didapatkan dari lapangan.
3. Menganalisis kesesuaian prinsip dan komponen dalam penerapan konsep sistem resi gudang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan status pelaksanaannya.
4. Menganalisis kesenjangan antara prinsip dan komponen dalam penerapan konsep sistem resi gudang dengan status implementasi yang terjadi saat ini.
5. Menentukan fit, yang terdiri dari fit, gap, dan partial fit conditions untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip aturan dalam konsep sistem resi gudang diterapkan.
6. Analisis penerapan prinsip dan aturan sistem resi gudang masih memiliki celah tertentu, untuk selanjutnya dapat dikemukakan saran-saran perbaikan penerapan sistem resi gudang agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Degree Of Fit:

Degree	Penjelasan
Fit	Prinsip dan aturan sistem resi gudang sepenuhnya telah diterapkan dalam pelaksanaannya.
Gap	Prinsip dan aturan sistem resi gudang belum diterapkan dalam proses pelaksanaannya.
Partial	Prinsip dan aturan sistem resi gudang telah diterapkan dalam pelaksanaannya namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dapat permasalahan dalam pelaksanaannya.

**3. Hasil dan Pembahasan**

Nelayan yang ada di Kabupaten Takalar untuk komoditi rumput laut ditemukan khususnya di Kecamatan Sanrobone, Desa Ujungbaji, hidup sebagai nelayan penghasil rumput laut. Rumput laut yang diproduksi adalah jenis Gracillaria Sp atau yang biasa disebut dengan Sango-sango. Nelayan memproduksi rumput laut dari hasil pengelola gudang yaitu Kospermindo yang membantu dalam bibit, dan pemasaran. Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi yang sangat besar yang ditunjang dengan luas laut 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan luas areal budidaya rumput laut mencapai 1.110.900 ha.

Secara aktual ini dapat disimpulkan bahwa sistem resi gudang komoditi rumput laut di Kabupaten Takalar masih kurang optimal yang diakibatkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Minimnya akses informasi tentang sistem resi gudang rumput laut, kendala pembiayaan karena keterikatan keuangan dengan tengkulak, dan kualitas rumput laut yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Kurangnya sosialisasi / edukasi / penyuluhan dan bimbingan tentang manfaat sistem resi gudang bagi petani khususnya.
3. Masyarakat tidak tertarik dengan sistem resi gudang karena mereka membutuhkan uang tunai langsung tanpa di barengi dengan banyaknya prosedur yang diberlakukan oleh sistem resi gudang.
4. Mindset nelayan /petani yang menyakini bahwa sistem resi gudang bagaikan gali lubang tutup lubang, karena keterikatan dengan pengelola gudang yang memberikan sarana dan prasarana bagi mereka.
5. Kesulitan petani memenuhi standar mutu komoditas yang dipersyaratkan dalam sistem resi gudang.
6. Keterbatasan lembaga penguji mutu di lokasi gudang yang dibangun pemerintah.

Secara aktual di lapangan masalah rumput laut yang dihasilkan para petani sangat beragam, mutu rumput laut yang baik seharusnya minimal di panen setelah berumur 45 hari. Kenyataannya, jika harganya sedang baik, maka tanaman yang belum mencapai usia matang pun dipanen demi mengejar pendapatan meskipun tidak melihat mutu dan kualitas yang dihasilkan dengan memproduksi rumput laut yang kurang dari 45 hari demi mengejar keuntungan. Pengembangan sistem resi gudang rumput laut pelaksanaannya kurang optimal di sebabkan karena masih kurang dipahami, infrastruktur fasilitas gudang masih kurang, dan peran pemerintah daerah masih terbatas, serta sumber daya keuangan yang terbatas untuk membantu produktifitas rumput laut, harga rumput laut tidak menunjukkan pola yang jelas, sehingga penimbunan komoditas membawa banyak risiko bagi pemilik komoditas.

Kinerja lembaga pembiayaan merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh petani rumput laut untuk mendapatkan modal dengan melakukan terobosan baru yaitu memberikan pelayanan satu pintu, juga dapat menyediakan fasilitas pengeringan, penggilingan, pengepakan dan lainnya yang berhubungan menambah nilai tambah untuk komoditi lebih mempunyai harga yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan pendapatan. Kelembagaan sistem resi gudang terutama pengelola gudang menguasai manajemen pergudangan dengan baik. Kapasitas untuk meramalkan pasar, produk yang dikelola, sumber daya manusia yang efektif, dan hubungan yang kuat dengan pemasok dan konsumen semuanya berperan dalam manajemen pergudangan. Jika hal ini dikendalikan dengan baik, maka pengelolaan pergudangan akan lebih efisien karena biaya dan waktu akan lebih terkelola dengan baik.

Adanya jaminan kinerja pengelola gudang merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan kepercayaan ke pihak perbankan. Gudang dijadikan lahan bis bagaimana rumput laut bisa dijadikan pabrik pengolahan rumput laut, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kinerja petani rumput laut, dan meningkatkan komitmen dan kinerja kelembagaan sistem resi gudang agar dapat bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem resi gudang komoditi rumput laut khususnya di Sulawesi Selatan. Pengelola gudang berperan penting dalam penerapan sistem resi gudang, karena pengelola gudang bertanggung jawab untuk penataan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang-barang yang disimpan oleh pemilik barang, serta penerbitan resi gudang. Pengelola gudang juga harus dapat

mengajak masyarakat umum untuk menggunakan sistem resi gudang sebagai metode penundaan penjualan dan alternatif pembiayaan, dan sebagai penghubung antara pemerintah, petani, koperasi/pelaku usaha, dan lembaga keuangan. Pengelola gudang tidak hanya ahli dalam bidang administrasi dan pengelolaan gudang, tetapi juga harus memiliki jiwa wirausaha. Pengelola gudang harus mampu memahami kondisi pasar dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan layanan sistem resi gudang yang dikelolanya agar berhasil. Yang harus diperhatikan adalah komitmen dukungan pemerintah pusat dan daerah, sarana dan prasarana gudang yang memadai, sumber daya manusia pengelola gudang yang kompeten dan mandiri, serta akses ke lembaga Perbankan.

Hal ini dipertegas oleh penelitian oleh (Regina, 2020) bahwa penulis menunjukkan bahwa sistem resi gudang telah meningkatkan pendapatan petani rumput laut di Sulawesi Selatan sistem resi gudang juga telah berhasil mengubah pola pikir petani ke arah pendekatan pertanian yang lebih berorientasi bisnis, yang memungkinkan petani untuk hidup lebih aman dan berkontribusi pada komunitas yang lebih kuat. Sistem resi gudang telah meningkatkan persepsi hidup para pembudidaya rumput laut, meskipun kurang berhasil. Kajian ini juga menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan, antara lain pembangunan gudang dengan fasilitas yang lengkap, distribusi informasi yang terorganisasi dengan baik, pengembangan satgas yang mengikutsertakan semua pelaku, dan terakhir, peningkatan teknologi informasi dan kapasitas petani.

Tabel 1. Analisis Kesenjangan ProsesPelaksanaan Sistem Resi Gudang Komoditi Rumput Laut Di Kabupaten Takalar

Tahapan/Variabel	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi yang Terjadi	Degree of Fit	Penyebab Kesenjangan
Peserta Sistem Resi Gudang	Petani/ Kelompok Tani/ Gapoktan, Pelaku usaha, dan Koperasi	Kelompok Tani	<i>Partial</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola gudang mengeluarkan aturan 50-200 ton untuk 1 resi gudang yang diterbitkan.</li> <li>• Petani tidak mampu memenuhi volume produksi ke dalam 1 resi gudang</li> </ul>
Penilaian kesesuaian (uji mutu rumput laut)	Pengujian mutu rumput laut disesuaikan dengan prosedur (SNI) 7578-2010	Prosedur pengambilan sampel tidak sesuai dengan (SNI) 7578-2010	Gap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumput laut homogen</li> </ul>
Sarana dan prasarana	Lembaga penilaian kesesuaian letak dengan gudang SRG Gudang SRG jauh dari sentra produksi	Jauh dari gudang SRG dan membutuhkan waktu dan biaya	Gap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letak dan waktu oleh LPK yakni BPSMB</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letak gudang SRG jauh dari sentra produksi</li> </ul>
Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dilakukan di setiap wilayah yang terdapat gudang SRG</li> <li>• Sosialisasi dilaksanakan menjelang musim panen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi baru dilaksanakan di Kecamatan Sanrobone, Desa Ujung Baji</li> </ul>	<i>Partial</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan jadwal sosialisasi Bappepti dan alokasi anggaran</li> <li>• Disesuaikan dengan jadwal sosialisasi Bappepti</li> </ul>

Berdasarkan analisis kesenjangan yang terdapat pada Tabel 12, dapat diketahui bahwa masih ada beberapa aspek dalam program sistem resi gudang yang belum terpenuhi dalam proses pelaksanaan sistem resi gudang komoditi rumput laut di Kabupaten Takalar.

1. Peserta sistem resi gudang

Dalam hal ini di lapangan Petani (kelompok tani/gabungan kelompok tani) dan koperasi termasuk pihak yang bisa mendapatkan kredit adalah fasilitas pinjaman yang mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah dengan jaminan resi gudang yang diberikan oleh bank BJB (Bank Jawa Barat) kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani & koperasi. Menurut Permendag Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang kualifikasi calon penerima skema sistem resi gudang. Sistem resi gudang terdapat pada Pasal 3 bahwa melalui skema sistem resi gudang program sistem resi gudang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, kelompok tani, gapoktan, dan koperasi.

Syarat kadar air 14% yang sesuai dengan SNI dsangat sulit di penuhi oleh para nelayan/petani tetapi dalam pelaksanaannya ada kebijakan dari pengelola gudang sebesar 15%-16% sehingga memenuhi kualitas untuk dimasukkan ke dalam gudang yaitu Kospermindo. Ditemukan kesenjangan karena dimana kadar air rumput laut rata-rata 15%-16% tidak sesuai dengan SNI tetapi ada kebijakan dalam pelaksanaan untuk memenuhi masuk ke gudang. Jadi kualitas mutu harus ditingkatkan dengan kadar yang sesuai dengan SNI 14%.

Implementasi sistem resi gudang pada komoditi rumput laut di Kabupaten Takalar adalah peserta sistem resi gudang penerima bukan petani tapi dalam bentuk kelompok tani. Hasil ini berdasarkan hasil wawancara mendalam dan pengamatan di lapang. Ada beberapa kelompok tani yang ada di Kabupaten Takalar khususnya di Desa UjungBaji Kecamatan Sanrobone. Ada sekitar 8 kelompok Tani di Desa UjungBaji Kecamatan Sanrobone. Setiap kelompok tani/nelayan ini memasukkan ke gudang dekat pemukiman tempat tinggal mereka. Pihak pengelola komoditi rumput

laut adalah Kospermindo yang berlokasi di KIMA. Kesimpulannya bahwa peserta sistem resi bukan petani/nelayan tetapi petani dalam bentuk kelompok tani, hal ini disebabkan sebagian besar petani belum memahami sistem resi gudang. Petani tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Permen yaitu UU No 9 Tahun 2011 dimana persyaratan tersebut adalah volume minimum barang untuk masuk ke gudang dan kualitas dan mutu harus memenuhi standar SNI. Hal ini dipertegas oleh (Dr. Abdul Halim Barkatullah, M.,Hum. Ifrani, SH. & Mirza Satria Buana, SH., 2010) bahwa kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem resi gudang di Kabupaten Barito Kuala masih terkendala. Minimnya sosialisasi kepada petani yang masih molor dari jadwal, tingginya suku bunga di tahun kedua bagi petani yang memanfaatkan sistem resi gudang, dan tingginya biaya operasional pengangkutan hasil pertanian dari lokasi petani ke gudang hanya menjadi beberapa kendala. Selanjutnya oleh (Salim et al., 2015) bahwa rumput laut berpotensi untuk dikembangkan sebagai komoditas karena proses budidayanya relatif sederhana dan ekonomis, dengan peluang gagal panen yang minimal, hasil yang tinggi, dan pemanenan dapat dilakukan setiap 45-60 hari, atau kira-kira empat kali dalam setahun. Salah satu faktor pendorong produksi rumput laut adalah tingginya harga jual rumput laut.

2. Lembaga penilaian kesesuaian

Lembaga penilaian kesesuaian yaitu BPSMB yang menguji mutu dan kualitas rumput laut terutama kadar air rumput laut. Secara homogen menyatakan bahwa rumput laut mempunyai kadar air yang sama dalam hal ini diatas kadar air berkisar 14% yaitu mencapai 15%-16%. Hal ini akan menurunkan kualitas rumput laut yang nantinya kan dieksport ke luar negeri misalnya Jepang dan Belanda. Dalam hal ini peningkatan kualitas mutu komoditi rumput sesuai dengan SNI sehingga harga lebih optimal di pasaran.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sistem resi gudang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sistem resi gudang. Hal ini dengan banyak gudang

yang ada di setiap daerah tetapi tidak berfungsi dengan baik karena dalam gudang tidak tersedia RMU, pengeringan dan alat-alat yang dapat menambah value added terhadap komoditi yang akan masuk ke gudang. Untuk uji mutu dan gudang di daerah tidak tersedia karena lokasinya berada di Kota Makassar. Dibutuhkan biaya dan waktu untuk melakukan pengujian mutu komoditi rumput laut. Begitu juga dengan gudang yang didirikan jauh dari sentra produksi sehingga membutuhkan biaya pengangkutan. Ditemukan bahwa kelancaran arus barang yang masuk ke dalam gudang itu mengalami hambatan antara lain biaya transport, biaya angkut, biaya penyimpanan dan biaya lainnya sehingga ini memberatkan petani untuk meresigudangkan komoditinya. Sebaiknya pemerintah memberikan subsidi khususnya biaya simpan, biaya uji mutu. Untuk biaya transport sebaiknya pemerintah membuat gudang tidak jauh dari sentra produksi begitu juga dengan lembaga uji mutu seharusnya pihak pengelola gudang diberikan pelatihan dan edukasi bagaimana menguji mutu dan kualitas dan diberikan sertifikat sebagai penguji mutu dan kualitas.

Karena penyediaan fasilitas pengolahan rumput laut diharapkan dapat mengurangi biaya bagi pelanggan, pemerintah harus menawarkan fasilitas pengolahan baik untuk gudang pemerintah maupun swasta. Untuk meyakinkan calon pengguna untuk menggunakan gudang swasta, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan dan pengoperasian fasilitas tersebut (Gunawan et al. 2019). Yang menjadi kesenjangan dari penelitian ini adalah terbatasnya sumber daya manusia khususnya kelembagaan sistem resi gudang yaitu pengelola gudang dan Lembaga penilaian kesesuaian. Ini dipertegas oleh (Bappebti, 2021) bahwa sebaiknya pengelola gudang yang mandiri dan profesional dalam menjalankan usaha sistem resi gudang, pola kemitraan dengan produsen/petani, dan konektivitas dengan pasar/stand by buyer). Selanjutnya oleh (SAFO, 2017) bahwa ada beberapa kesenjangan kelembagaan diidentifikasi sebagai batasan utama keberhasilan pengoperasian sistem resi gudang. Skema ini tidak memiliki undang-undang, pasar pertukaran komoditas, dana ganti rugi, dan gudang bersertifikat jaringan. Tingkat produksi yang rendah, gudang masyarakat yang tidak memadai, dan tingkat pengetahuan yang rendah tentang beberapa manfaat skema telah membatasi partisipasi petani kecil.

#### 4. Sosialisasi sistem resi gudang

Sosialisasi yang ditemukan dilapangan bahwa baru beberapa kali (2-3) diadakan sosialisasi di Kecamatan Sanrobone, Desa UjungBaji. Itupun pada saat sesudah panen rumput laut sehingga banyak nelayan yang belum

mengetahui apa manfaat sebenarnya Sistem resi gudang, dikemanakan hasil produksinya. Ini membuat tengkulak datang mendekati mereka untuk membeli dengan harga dibawah harga gudang. Sosialisasi ini disesuaikan dengan jadwal sosialisasi Bappebti dan alokasi anggaran yang telah disepakati di pusat. Seharusnya sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah yang terdapat gudang dan dilaksanakan pada saat sebelum panen. Sehingga ditemukan bahwa sistem resi gudang masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani sebagai alternatif pembiayaan operasional budidaya rumput laut. Beberapa kendala yang dihadapi adalah mengenai sosialisasi sistem resi gudang yang masih di tingkat elit Kementerian dan Pemerintah Daerah, belum menjangkau petani, pedagang pengumpul atau bahkan penyedia dana baik bank maupun non-bank. Kendala lainnya adalah waktu penerbitan resi gudang yang masih lebih lama dibandingkan pinjaman dari tengkulak. Waktu yang ideal kurang dari 1 minggu, yaitu sekitar 3 hari. Selanjutnya dipertegas oleh (Mtanda, 2015) bahwa studi ini menemukan bahwa sistem resi gudang membawa masalah bagi sebagian besar petani kecil produsen kacang mete. Masalah-masalah tersebut antara lain kekacauan, ketidakpercayaan pemimpin, kurangnya transparansi, keterlambatan pembayaran tunai, infrastruktur yang buruk, kebijakan yang buruk, bias dalam menyebarkan informasi dan korupsi.

#### 4. Kesimpulan

- Analisis kesenjangan proses pelaksanaan sistem resi gudang untuk komoditi rumput laut. Analisis kesenjangan secara aktual di lapangan dapat dilihat bahwa pesertanya sistem resi gudang untuk rumput laut pesertanya adalah kelompok tani
- Lembaga penilaian kesesuaian yakni BPSMB dalam pengambilan sampel bersifat homogen terhadap komoditi rumput laut.
- Keterbatasan pengelola gudang dan lembaga penilaian kesesuaian, sarana dan prasarana. Sosialisasi/edukasi, pendampingan bagi masyarakat petani/nelayan / koperasi dan pelaku usaha tentang manfaat sistem resi gudang. untuk menghemat uang pelanggan untuk transportasi, gudang umum yang dibangun pemerintah di masa depan harus terletak dekat dengan pusat produksi padi. Saat ini, salah satu faktor utama yang mendorong petani untuk menggunakan gudang umum adalah kedekatan fasilitas tersebut dengan pusat produksi.

#### Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak yang telah membantu yaitu Dinas perdagangan dan Perindustrian, pengelola gudang yaitu Kospermindo dan nelayan rumput laut di Desa Ujungbaji,

Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Semoga ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

#### Daftar Pustaka

- Akrim, Djudsil, Gufron D. Dirawan, And Bakhrani A. Rauf. 2019. "Perkembangan Budidaya Rumput Laut Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir Di Indonesia." *Unm Environmental Journals* 2(2):52.
- Anitasari, R. .. 2015. "The Developments Of Warehouse Receipt System And Obstacles Faced." *International Journal Of Business, Economic And Law* 6(4):2009–11.
- Armansyah, D. 2020. "Scenario Planning Application Of Shallot Warehouse Receipt System (Srg) In Sumbawa Regency." *Ejournal.Ipdn.Ac.Id* Xii:49–67.
- Burkhard Schwenker · Torsten Wulf. 2013. *Scenario-Based Strategic Planning*.
- Edi, Sutriyono, Hermanto Siregar, Lukman Mohammad Baga, And Arif Imam Suroso. 2019. "Indonesia Berbasis Sistem Resi Gudang Stakeholder Analysis Of Indonesian Seaweed Supply Chain Based On Warehouse Receipt System Rantai Pasokan Merupakan Serangkaian Proses Alur Bisnis Yang Terdiri Dari Beberapa Lapisan ( Hallikas Et Al , 2004 ). Manajemen." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 13(2):281–308.
- Gunawan, Endro, John K. M. Kuwornu, Avishek Datta, And Loc T. Nguyen. 2019. "Factors Influencing Farmers' Use Of The Warehouse Receipt System In Indonesia." *Agricultural Finance Review* 79(4):537–63.
- Hidayah, Khoirul, And Iffaty Nasyi. 2019. "Warehouse Receipt System Regulation In Indonesia: Is It Beneficial For Small." 3(2):162–75.
- Julier.dahlquist richard.j.bauer, J. R. .. 2012. *Analysis Of Gaps Identifying Profitable Gaps For Trading*. Edited By J. Boyd. United States Of America: Tim Moore Associate Publisher And Director Of Marketing: Amy Neidlinger Executive.
- Langford, Gary O., And Senior Lecturer. 2007. "Gap Analysis: Rethinking The Conceptual Foundations."
- Mardia, Mardia. 2022. "Skenario Kebijakan Sistem Resi Gudang Komoditi Jagung, Rumput Laut Dan Gabah Di Sulawesi Selatan (Studi Kasus)."
- Muchsam, Yoki, Falahah, And Galih Irianto Saputro. 2011. "Penerapan Gap Analysis Pada Pengembangan Sistem Pendukung." *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi* 2011(Snati):17–18.
- Sulistyaningsih , Rudi Wibowo , Yuli Hariyati, Evita Soliha Hani. 2019. "Farmers' Understanding Toward The Warehouse Receipt System's Policy In East Java Indonesia." *International Journal Of Research-Granthaalayah*.
- Suryaningsih, Ita. 2021. "Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Di Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo."